

Judul : Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik - Fahri: DPR Melakukan Reformasi Kelembagaan
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik Fahri: DPR Melakukan Reformasi Kelembagaan



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dalam Seminar Nasional bertajuk "Dinamika Dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan" di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/4).

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) terus berupaya menjawab 'tantangan' publik. Pimpinan DPR melakukan reformasi kelembagaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan. Selain aspek kedewanan, pimpinan DPR juga mendorong reformasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dalam mendukung kinerja anggota Dewan.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, lembaga legislatif dihadapkan pada situasi sosial dan politik yang cukup kompleks dan dinamis. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja anggota Dewan, kata dia, DPR dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, yakni lemahnya citra lembaga perwakilan.

"Kinerja DPR tak sepenuhnya dipandang baik oleh rakyat. Karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dari aspek kedewanan dan kesekretariatan," tegas Fahri dalam Seminar Nasional bertajuk "Dinamika Dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan" di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/4).

Menurutnya, penataan aspek kedewanan dan kesekretariatan harus difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata laksana, serta perbaikan sarana dan prasarana. Aspek kemandirian anggaran, optimalisasi teknologi informasi dan pembedahan birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menyelesaikan agenda reformasi kelembagaan.

"Sebagai lembaga perwakilan, posisi DPR harus semakin otonom. DPR merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern, memegang posisi sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui mekanisme *check and balances*," tutur politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR, Adies Kadir menambahkan, pandangan publik terkait citra DPR tak sepenuhnya benar. Menurut dia, persepsi itu merupakan

bentuk kecintaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan, karena kecintaan bisa diekspresikan dalam bentuk apresiasi, pujian, dan kritik.

"Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin. Hal itu membuat kita semakin *aware* dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)," jelas Adies.

Dengan dinamika politik yang begitu kompleks, lanjut dia, DPR tetap mampu mengimplementasikan tema besar DPR periode saat ini, yakni membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen. Karenanya, MKD menggelar seminar nasional bertajuk "Dinamika Dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan" untuk merespons dan mengkomodasi persepsi

publik sekaligus mensosialisasikan hasil-hasil yang telah dicapai lembaga perwakilan.

"Kami ingin masyarakat melihat DPR telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada. Kesimpulan sejumlah lembaga survey yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup, harus dihilangkan. Namun, upaya tersebut tidaklah mudah. Dinamika sosial, politik dan ekonomi senantiasa memberi warna tersendiri tentang perjalanan tugas dan fungsi lembaga perwakilan," tutur dia.

Adies menambahkan, jumlah oknum anggota Dewan yang tersangkut kasus dugaan korupsi sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota DPR. Namun, peristiwa itu kerap menjadi sorotan atau diberitakan secara menghebohkan. "Di eksekutif, berapa banyak gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi? Tapi, suaranya nyaris tak terdengar," cetus dia.

Karena itu, sambung dia, MKD terus berupaya menjaga citra, wibawa serta keluhuran martabat DPR secara kelembagaan maupun personal. "MKD berdiri di garis terdepan, dalam mengawasi kinerja lembaga perwakilan, sekaligus memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang lembaga legislatif," tandasnya.

Selain Adies, Wakil Ketua MKD DPR, Sarifuddin Sudding, anggota MKD Maman Imanul Haq, dan Guntur Sasono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. MKD juga menghadirkan beberapa pembicara yang menjadi pakar dibidangnya, antara lain Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Laica Marzuki dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. ■ TIM



Adies Kadir